DAMPAK REKLAMASI PANTAI BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nur Azizah Rezkia Latif
NPP. 33.0941
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: nurazizahrezkialatif@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Hj. Helwani, S.Ag., M.Pd.I
Email: Helwani@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP)*: Coastal reclamation is a government strategy to address land constraints in the coastal areas of major cities such as Makassar, aimed at supporting the development of infrastructure, housing, public spaces, and economic activities. In the context of this study, reclamation in Makassar utilizes materials from marine sand mining in North Galesong Subdistrict, Takalar Regency, reflecting inter-regional linkages in supporting urban development. The impacts of this reclamation are felt not only in Makassar City as the development hub but also in North Galesong Subdistrict as both a buffer zone and a supplier of reclamation materials.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the impacts of coastal reclamation using materials from marine sand mining activities on the social, economic, and governance conditions in Galesong Utara Subdistrict, Takalar Regency.* ***Method****: The study employs the theory of governance ecology to analyze the issues using a qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation, drawing on informants from government agencies, coastal communities, and affected economic actors.* ***Result:*** *The research findings indicate changes in community relations characterized by conflicting interests between pro- and anti-groups. While these changes create business opportunities and increase local revenue, the benefits are not felt equally. However, negative impacts have also emerged, including a decline in catch yields and rising operational costs, thereby exacerbating economic inequality and as well as uneven adaptation efforts.* ***Conclusion:*** *This study highlights a development paradox, wherein increased local revenue does not always translate into improved well-being for coastal communities. Therefore, more responsive and equitable policies are needed to ensure the equitable distribution of development benefits.*
.

Keywords: *Coastal Reclamation; Coastal Community; Economic Inequality; Governmental Ecology; Sea Sand Mining*

ABSTRAK

Permasalahan (Research Gap): Reklamasi pantai merupakan strategi pemerintah dalam mengatasi keterbatasan lahan di wilayah pesisir kota besar seperti Makassar, yang bertujuan mendukung pembangunan infrastruktur, permukiman, ruang publik, serta aktivitas ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, reklamasi di Makassar memanfaatkan material dari penambangan pasir laut di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang mencerminkan adanya keterkaitan antarwilayah dalam mendukung pembangunan perkotaan. Dampak reklamasi tersebut tidak hanya dirasakan di Kota Makassar sebagai pusat pembangunan, tetapi juga di Kecamatan Galesong Utara sebagai wilayah penyangga sekaligus pemasok material reklamasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak reklamasi pantai yang materialnya berasal dari aktivitas penambangan pasir laut terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan pemerintahan di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. **Metode**: Penelitian menggunakan teori ekologi pemerintahan dalam menganalisis permasalahan dengan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan dari unsur pemerintah, masyarakat pesisir, dan pelaku ekonomi terdampak. **Hasil/Temuan**: Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan hubungan masyarakat yang ditandai perbedaan kepentingan antara kelompok pro dan kontra. memberikan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan daerah, akan tetapi tidak dirasakan secara merata. Namun dampak negatif juga terjadi, yakni adanya penurunan hasil tangkapan dan peningkatan biaya operasional, sehingga memunculkan ketimpangan ekonomi, serta adanya upaya adaptasi yang tidak merata. **Kesimpulan:** Penelitian ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan, di mana peningkatan pendapatan daerah tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan untuk menjamin pemerataan manfaat pembangunan.

Kata kunci: Ekologi Pemerintahan; Ketimpangan Ekonomi; Masyarakat Pesisir; Penambangan Pasir Laut; Reklamasi Pantai

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reklamasi pantai merupakan strategi yang banyak diterapkan oleh pemerintah di berbagai negara untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah pesisir, mendukung pertumbuhan ekonomi perkotaan, serta mengembangkan infrastruktur publik. Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur menjalankan proyek reklamasi berskala besar bernama Center Point of Indonesia (CPI) yang dimulai pada tahun 2015, mencakup seluas 157 hektar kawasan pesisir yang diarahkan sebagai pusat bisnis, ruang publik, dan fasilitas perkotaan. Proyek ini secara langsung mengubah karakteristik fisik pesisir Makassar, termasuk pola arus, sedimentasi, kualitas perairan, dan ekosistem pesisir yang tidak hanya berdampak di area reklamasi sendiri, tetapi juga menyebar ke wilayah pesisir sekitarnya. (Aswandi, 2024)

Salah satu wilayah yang secara langsung merasakan dampak tersebut adalah Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kota Makassar dan menjadi kawasan pemasok utama pasir laut sebagai material reklamasi CPI. Kecamatan Galesong Utara memiliki garis pantai yang rentan terhadap abrasi, dengan data mencatat 74 km

garis pantai Takalar terpapar abrasi akibat penambangan pasir, di mana di beberapa titik seperti Aeng Batu-Batu mencapai 100 meter. Masyarakatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, dengan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar mencatat 9.772 nelayan menghasilkan 25.165 ton perikanan tangkap senilai lebih dari Rp687 miliar per tahun, sangat rentan terhadap perubahan ekosistem laut.

Penelitian sebelumnya tentang reklamasi pantai sebagian besar berfokus pada wilayah reklamasi itu sendiri, seperti Pahlevi (2025) yang mengkaji dampak reklamasi di Kota Makassar, Agustina dkk. (2023) yang meneliti abrasi di pesisir Galesong dari perspektif fisik-spasial, serta Firmansyah (2020) yang menganalisis kebijakan reklamasi Jakarta secara makro. Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah dampak lintas batas reklamasi terhadap wilayah pemasok material seperti Galesong Utara, terutama dari perspektif ekologi pemerintahan yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan sistem pemerintahan secara bersamaan, masih sangat terbatas. Kondisi inilah yang menjadi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang hendak dijawab oleh penelitian ini.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Meskipun reklamasi pantai Makassar telah menjadi perhatian berbagai peneliti, mayoritas kajian lebih menekankan analisis fisik-spasial (perubahan garis pantai, abrasi) atau tinjauan kebijakan di tingkat makro. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana dampak reklamasi dirasakan oleh wilayah yang tidak direklamasi, tetapi menanggung beban ekologis dan sosial-ekonomi sebagai pemasok material reklamasi. Galesong Utara justru menjadi contoh nyata wilayah penyangga yang mengalami tekanan berlapis: abrasi masif akibat pengambilan pasir laut, penurunan hasil tangkapan nelayan rata-rata 62,25% berdasarkan data (Daris et al., 2023b), meningkatnya ketimpangan ekonomi yang tercermin dari kenaikan Gini Rasio Kabupaten Takalar dari 0,365 (2021) menjadi 0,385 (2024), sekaligus munculnya peluang ekonomi baru yang tidak terdistribusi secara merata di masyarakat. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji dampak lintas batas (*cross-boundary impact*) reklamasi CPI secara komprehensif menggunakan perspektif ekologi pemerintahan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan gambaran empiris tentang bagaimana kebijakan pembangunan di satu wilayah dapat memberikan dampak multidimensi terhadap wilayah lain yang secara administratif berbeda namun terhubung secara ekologis dan ekonomi. Urgensi akademis penelitian ini terletak pada kebaruannya dalam mengaplikasikan konsep ekologi pemerintahan untuk menganalisis dampak reklamasi lintas batas, suatu pendekatan yang belum banyak digunakan sebelumnya. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi basis empiris bagi pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam merumuskan kebijakan perlindungan masyarakat pesisir yang lebih responsif dan berkeadilan. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris untuk merancang kebijakan mitigasi yang tepat sasaran, sehingga upaya penanggulangan dampak reklamasi berisiko tidak efektif dan tidak berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti telah merujuk pada beberapa kajian terdahulu yang relevan. (Pahlevi & Tjenreng, 2025) mengkaji dampak reklamasi pantai di Kota Makassar dengan metode kualitatif deskriptif dan menemukan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini

berbeda karena berfokus pada Galesong Utara sebagai wilayah penyangga, bukan lokasi reklamasi langsung. (AGUSTINA et al., 2023) menganalisis abrasi pantai di Galesong Kabupaten Takalar menggunakan analisis citra satelit dan GIS, menemukan abrasi signifikan di beberapa titik pesisir. Penelitian ini berbeda karena menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji dampak sosial-ekonomi dan pemerintahan, bukan hanya aspek fisik-spasial. (Firmansyah, 2020) meneliti kebijakan reklamasi Pantai Jakarta secara makro dan menemukan resistensi publik serta permasalahan tata ruang; penelitian ini berbeda karena bersifat analisis lapangan di tingkat lokal. (Inaku et al., 2021)mengkaji dinamika fisik pesisir Takalar menggunakan analisis oseanografi; berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada dimensi sosial-ekonomi masyarakat. (Anwar, 2020) meneliti implementasi kebijakan reklamasi di Baubau; kesamaannya terletak pada pendekatan kualitatif, namun penelitian ini lebih menekankan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga dimensi utama yang membedakannya secara substantif dari seluruh penelitian terdahulu, yakni dari segi objek penelitian, kerangka teori, serta metode dan konteks analisis. Perbedaan tersebut diuraikan secara eksplisit berikut ini sebagai *evident* kebaruan ilmiah.

Pertama, dari segi karakteristik objek penelitian, penelitian ini secara spesifik mengkaji dampak tidak langsung (*indirect impact*) reklamasi CPI Makassar terhadap Kecamatan Galesong Utara sebagai wilayah pemasok material reklamasi, bukan lokasi reklamasi itu sendiri. Hal ini berbeda secara mendasar dari kelima penelitian terdahulu. Pada penelitian: (a) (Pahlevi & Tjenreng, 2025) yang meneliti dampak reklamasi di Kota Makassar sebagai lokasi reklamasi langsung, sedangkan penelitian ini berfokus pada wilayah penyangga di kabupaten berbeda yang menanggung beban ekologis sebagai pemasok pasir laut; (b) (Agustina et al., 2023) mengkaji abrasi pantai di Galesong, Kabupaten Takalar, namun hanya pada dimensi fisik-spasial berupa perubahan garis pantai, berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji masyarakat Galesong Utara sebagai subjek yang merasakan dampak sosial-ekonomi dan pemerintahan secara langsung; (c) (Firmansyah, 2020) meneliti reklamasi Pantai Jakarta sebagai kebijakan makro nasional, sementara penelitian ini bersifat analisis mikro lapangan di tingkat kecamatan dengan melibatkan masyarakat terdampak sebagai sumber data utama; (d) (Inaku et al., 2021) mengkaji karakteristik fisik pesisir Takalar dari perspektif oseanografi dengan objek berupa data gelombang dan garis pantai, bukan perspektif masyarakat dan pemerintahan; serta (e) (Anwar, 2020) meneliti reklamasi Pantai Kotamara di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, yang merupakan lokasi reklamasi tersendiri dan tidak memiliki hubungan ekologis lintas batas sebagaimana yang terjadi antara CPI Makassar dan Galesong Utara.

Kedua, dari segi kerangka teori, penelitian ini mengaplikasikan konsep ekologi pemerintahan (Syafiie, 2019) yang mencakup tiga dimensi sekaligus, yakni sosial, ekonomi, dan sistem pemerintahan, untuk menganalisis fenomena reklamasi lintas batas wilayah administratif. Kerangka teori ini berbeda secara signifikan dari yang digunakan penelitian terdahulu, seperti penelitian (Pahlevi & Tjenreng, 2025) yang menggunakan pendekatan dampak lingkungan umum tanpa kerangka ekologi pemerintahan yang spesifik; (AGUSTINA et al., 2023) dan (Inaku et al., 2021) menggunakan teori geomorfologi dan oseanografi yang bersifat fisik-saintifik, bukan teori ilmu pemerintahan; (Firmansyah, 2020) menggunakan teori kebijakan publik dan tata ruang wilayah; serta (Anwar, 2020) menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan

Van Horn yang berfokus pada proses pelaksanaan kebijakan, bukan pada dampaknya terhadap ekologi pemerintahan. Tidak satu pun dari kelima penelitian terdahulu tersebut yang menggunakan ekologi pemerintahan sebagai pisau analisis untuk membedah dampak reklamasi, sehingga penelitian ini menghadirkan perspektif teoritik yang baru dalam kajian reklamasi pantai di Indonesia.

Ketiga, dari segi metode dan konteks analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk menangkap dinamika sosial-ekonomi dan pemerintahan secara holistik di wilayah penyangga reklamasi. Pendekatan ini berbeda dari: Agustina dkk. (2023) dan Inaku dkk. (2021) yang menggunakan metode kuantitatif berbasis penginderaan jauh, analisis citra satelit, GIS, dan data oseanografi sehingga tidak mampu menangkap persepsi, adaptasi, dan dinamika sosial masyarakat; serta Firmansyah (2020) yang menggunakan analisis kebijakan dokumen (*desk research*) tanpa pengumpulan data lapangan langsung dari masyarakat terdampak. Dari segi konteks, penelitian ini juga merupakan yang pertama mendokumentasikan secara empiris dampak lintas batas (*cross-boundary impact*) reklamasi CPI Makassar terhadap wilayah pesisir di kabupaten tetangga, sehingga temuan penelitian ini tidak dapat disamakan dengan kajian yang dilakukan dalam satu wilayah administratif tunggal.

Dengan demikian, secara keseluruhan penelitian ini menghadirkan kontribusi ilmiah baru yang bersifat multidimensi: baru dari sisi objek (wilayah penyangga reklamasi lintas batas sebagai unit analisis), baru dari sisi teori (ekologi pemerintahan Syafiie sebagai alat analisis dampak reklamasi), dan baru dari sisi metode-konteks (pendekatan kualitatif lapangan untuk menangkap paradoks pembangunan pesisir di wilayah pemasok material). Ketiga dimensi kebaruan ini menempatkan penelitian ini sebagai kajian yang tidak sekadar mereplikasi atau melengkapi penelitian sebelumnya, tetapi membuka perspektif analisis baru dalam studi reklamasi pantai dan tata kelola pesisir di Indonesia.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak reklamasi pantai dari segi ekologi pemerintahan bagi masyarakat di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, serta mendeskripsikan upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang ditimbulkan oleh reklamasi pantai terhadap masyarakat pesisir Galesong Utara dalam konteksnya yang alami. Metode ini dipilih karena fenomena yang diteliti bersifat kompleks, kontekstual, dan tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui data kuantitatif semata (Moleong, 2017; Wasistiono & Simangunsong, 2020)

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tujuh informan yang dipilih melalui kombinasi *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan kunci terdiri dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Takalar (I1) dan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

(I2) sebagai representasi pembuat kebijakan; Camat Galesong Utara (I3) sebagai penghubung pemerintah-masyarakat; serta satu nelayan (I4) sebagai kelompok terdampak langsung. Melalui *snowball sampling*, informan berkembang mencakup pekerja tambang pasir (I5), pedagang (I6), dan masyarakat umum (I7) sebagai representasi kelompok yang terpengaruh secara berbeda oleh aktivitas reklamasi. Kombinasi ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh gambaran menyeluruh dari perspektif pengambil kebijakan, pelaksana, dan penerima dampak.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari pemerintah, pengusaha/pekerja, dan masyarakat terdampak), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta triangulasi waktu (wawancara dilakukan pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi data). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan pisau analisis teori ekologi pemerintahan Syafiie (2019) yang mencakup tiga dimensi: sosial, ekonomi, dan sistem pemerintahan.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan lokasi fokus pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERINDA) Kabupaten Takalar, yang berlokasi di Jl. Syech Yusuf No.2b, Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada bulan Januari 2026, dengan total durasi penelitian sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi berlangsung dari November 2025 hingga Juni 2026 sesuai kalender akademik IPDN Tahun Akademik 2025/2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis dampak reklamasi pantai Kota Makassar bagi masyarakat di Kecamatan Galesong Utara menggunakan teori ekologi pemerintahan (Syafiie, 2019) yang mencakup tiga dimensi: sosial, ekonomi, dan sistem pemerintahan. Analisis didasarkan pada hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi yang dilakukan pada bulan Januari 2026.

3.1. Dampak Sosial Reklamasi Pantai terhadap Masyarakat Kecamatan Galesong Utara

a. Perubahan Hubungan Sosial Masyarakat

Aktivitas penambangan pasir laut sebagai material reklamasi CPI Makassar telah menimbulkan perubahan signifikan dalam struktur hubungan sosial masyarakat Galesong Utara. Sebelum adanya penambangan, sebagian besar masyarakat memiliki kesamaan profesi dan kepentingan sebagai nelayan, menciptakan ikatan sosial yang relatif homogen. Namun, berkembangnya aktivitas penambangan memunculkan variasi kepentingan ekonomi yang menyebabkan diferensiasi sosial dalam masyarakat.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala BAPPERINDA Kabupaten Takalar, Bapak Drs. Rahmansyah Lantara, M.Si, yang menyatakan bahwa hubungan antar masyarakat sebenarnya tetap baik, namun sempat ada perbedaan pendapat antara yang setuju karena mendapat pekerjaan dan yang tidak setuju karena merasa dirugikan; meskipun tidak sampai mengganggu secara signifikan dan interaksi sosial masyarakat justru menjadi lebih dinamis dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, nelayan seperti Daeng Situju merasakan langsung

dampak negatifnya: sejak reklamasi ada perbedaan pandangan di antara masyarakat, sebagian mendukung karena melihat pembangunan ekonomi, tetapi nelayan harus melaut lebih jauh sehingga pengeluaran menjadi lebih besar.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil observasi lapangan yang menunjukkan adanya aksi demonstrasi masyarakat sebagai bentuk ekspresi kolektif terhadap dampak penambangan, yang mengindikasikan bahwa perubahan sosial tersebut mengandung potensi konflik akibat ketimpangan distribusi dampak. Dalam perspektif ekologi pemerintahan, fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan pembangunan dan kondisi sosial masyarakat, di mana kelompok yang memperoleh manfaat dan kelompok yang menanggung kerugian berbeda, sehingga menghasilkan dinamika sosial yang terpolarisasi.

Temuan ini sejalan dengan kajian (Bamasood et al., 2025) yang meneliti dampak reklamasi pantai terhadap nelayan skala kecil di Penang, Malaysia, menggunakan kerangka *Sustainable Livelihoods Framework* (SLF). Mereka menemukan bahwa reklamasi secara konsisten melemahkan modal alami (*natural capital*) dan modal manusia (*human capital*) nelayan, sementara modal sosial (*social capital*) relatif bertahan berkat kuatnya jaringan komunitas dan kepemimpinan lokal. Kondisi yang sama tampak di Galesong Utara: meskipun reklamasi memecah belah kepentingan ekonomi masyarakat, ikatan sosial informal berbasis komunitas pesisir masih menjadi perekat yang mencegah konflik terbuka. Selain itu, Pahlevi dan Tjenreng (2025) dalam kajian mereka tentang reklamasi Pantai Losari Makassar menemukan pula bahwa reklamasi menimbulkan keresahan sosial di kalangan masyarakat terdampak, suatu temuan yang memperkuat bukti empiris bahwa polarisasi sosial merupakan dampak lintas lokasi dari proyek CPI, tidak hanya terjadi di wilayah reklamasi itu sendiri tetapi juga di wilayah pemasok material seperti Galesong Utara.

b. Adaptasi Sosial Masyarakat

Masyarakat pesisir Galesong Utara menunjukkan berbagai bentuk adaptasi terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh reklamasi pantai. Perubahan paling nyata tampak pada pola aktivitas melaut, di mana nelayan harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk memperoleh hasil tangkapan yang memadai, yang secara langsung meningkatkan biaya operasional dan menciptakan ketidakpastian pendapatan. Daeng Situju mengungkapkan bahwa dirinya harus mengeluarkan usaha ekstra karena harus melaut lebih jauh dari sebelumnya sehingga biaya bertambah, dan ketika hasil tangkapan sedikit terpaksa mencari pekerjaan lain, termasuk ikut di kegiatan tambang pasir atau usaha kecil-kecilan.

Diversifikasi mata pencaharian menjadi bentuk adaptasi utama yang dilakukan masyarakat. Sebagian nelayan mulai beralih atau menambah pekerjaan di sektor non-perikanan, seperti bekerja sebagai sopir truk pengangkut pasir, pekerja tambang, atau membuka usaha kecil. Namun kemampuan adaptasi tersebut tidak merata. Mereka yang memiliki modal, jaringan, atau keterampilan tambahan lebih mudah beralih ke sektor lain, sementara nelayan yang hanya memiliki keahlian melaut menghadapi kesulitan lebih besar. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di dalam masyarakat dan menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mendukung proses adaptasi secara berkelanjutan belum optimal.

Pola diversifikasi mata pencaharian yang tidak merata ini sejalan dengan temuan Afnas (2018) dalam kajiannya tentang pemberdayaan kelompok nelayan Pulau Saugi melalui program

Mata Pencaharian Alternatif (MPA) oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Afnas menemukan bahwa efektivitas program MPA sangat bergantung pada ketersediaan modal awal, jaringan sosial, dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan faktor-faktor yang justru tidak merata di kalangan nelayan. Nelayan yang memiliki akses terhadap ketiga faktor tersebut berhasil beradaptasi, sementara mereka yang tidak memilikinya terjebak dalam lingkaran ketidakpastian pendapatan. Kondisi serupa terjadi di Galesong Utara, di mana adaptasi masyarakat bersifat selektif dan tidak merata, sehingga peran pemerintah dalam menyediakan program pemberdayaan yang merata dan berkesinambungan menjadi sangat krusial.

c. Persepsi dan Kepuasan Masyarakat

Persepsi masyarakat terhadap reklamasi bersifat heterogen dan ditentukan oleh posisi ekonomi masing-masing kelompok dalam ekosistem pembangunan. Kelompok yang memperoleh manfaat langsung dari aktivitas penambangan, seperti pekerja tambang, sopir truk, dan pedagang, cenderung memiliki persepsi positif. Ibu Daeng Ngintang yang berprofesi sebagai pedagang menyatakan bahwa kehadiran proyek penambangan cukup membantu usahanya karena banyak pekerja yang singgah, dan ada juga masyarakat yang merasa terbantu karena mendapatkan pekerjaan lain selain melaut.

Sebaliknya, nelayan seperti Ibu Haryati memiliki persepsi berbeda: meskipun pembangunan memang ada perubahannya, bagi nelayan justru lebih susah karena harus melaut lebih jauh dan hasilnya tidak menentu. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan reklamasi secara umum rendah di kalangan nelayan, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara realitas lapangan dan harapan mereka. Fenomena penolakan yang ditunjukkan melalui aksi demonstrasi pada tahap awal pelaksanaan mempertegas bahwa tingkat penerimaan masyarakat tidak bersifat homogen. Dalam perspektif ekologi pemerintahan, kondisi ini mencerminkan bahwa pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemerataan masih sangat diperlukan.

Heterogenitas persepsi masyarakat ini berkaitan erat dengan cara masing-masing kelompok terpapar dampak reklamasi. Kajian (Zhou et al., 2025) terhadap dampak reklamasi lahan di Macao SAR menemukan bahwa reklamasi meningkatkan nilai layanan ekosistem perkotaan sebesar 13%, namun secara bersamaan menurunkan ketangguhan ekologis *(ecological resilience*). Temuan ini menjelaskan mengapa kelompok yang terhubung dengan sektor perdagangan dan jasa baru mempersepsikan reklamasi secara positif, sementara nelayan yang bergantung pada ketangguhan ekosistem laut justru merasakan dampak sebaliknya. Di Galesong Utara, degradasi ekosistem pesisir yang ditimbulkan oleh penambangan pasir laut menciptakan kondisi serupa: mereka yang berada di luar sektor perikanan tangkap cenderung menikmati dampak positif reklamasi, sementara nelayan menjadi kelompok yang paling terpinggirkan.

3.2. Dampak Ekonomi Reklamasi Pantai terhadap Masyarakat Kecamatan Galesong Utara

a. Pertumbuhan Peluang Usaha dan Ekonomi Lokal

Reklamasi pantai CPI dan aktivitas penambangan pasir yang menyertainya mendorong munculnya berbagai peluang usaha baru di Kecamatan Galesong Utara. Data BPS Kabupaten Takalar menunjukkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi daerah yang

salah satu sumbernya berasal dari aktivitas penambangan pasir laut, yakni meningkat dari Rp1,90 miliar (2021) menjadi Rp3,13 miliar (2022).

Tabel 1.
Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021-2024

No.	Tahun	PAD (Retribusi Daerah) (Rp)
1.	2021	1.899.628.000
2.	2022	3.129.372.000
3.	2023	2.552.794.000
4.	2024	2.265.188.000

Sumber: BPS Kabupaten Takalar, diolah oleh Peneliti 2026

Kepala BAPPERINDA Kabupaten Takalar menegaskan bahwa reklamasi menyebabkan Kecamatan Galesong Utara mengalami peningkatan aktivitas ekonomi, di mana kegiatan penambangan pasir laut secara tidak langsung membuka peluang usaha bagi masyarakat di berbagai sektor seperti sopir truk, pekerja lapangan, dan usaha kecil pendukung. Daeng Rewa sebagai pekerja tambang juga membenarkan hal tersebut dengan menyatakan bahwa adanya tambang pasir membuka lapangan kerja dan penghasilan menjadi lebih jelas. Meskipun demikian, peluang usaha baru yang muncul cenderung terbatas pada aktivitas yang terkait langsung dengan reklamasi, sehingga keberlanjutannya bergantung pada keberlangsungan proyek tersebut.

Peningkatan PAD ini perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas (Kuang et al., 2024) dalam kajian mereka tentang dampak proyek reklamasi terhadap kualitas air di Jinmeng Bay, Tiongkok, menemukan bahwa reklamasi secara signifikan memperpanjang waktu tinggal polutan di perairan hingga 35%, yang pada gilirannya menurunkan kapasitas dilusi dan difusi pencemar di perairan pesisir. Kondisi degradasi kualitas perairan yang serupa di sekitar area reklamasi CPI berkontribusi pada berkurangnya sumber daya ikan yang menjadi basis penghidupan nelayan Galesong Utara. Dengan demikian, peningkatan PAD dari retribusi penambangan pasir tidak dapat dipisahkan dari biaya sosial yang harus ditanggung oleh nelayan berupa penurunan produktivitas tangkap. Ini menjadi bukti konkret dari paradoks fiskal-sosial yang terjadi di Kabupaten Takalar.

b. Perubahan Mata Pencaharian dan Pekerjaan

Reklamasi pantai mengubah struktur mata pencaharian masyarakat Galesong Utara secara fundamental. Sebelum adanya penambangan, mayoritas masyarakat bergantung pada sektor perikanan tangkap. Namun, penurunan hasil tangkapan yang drastic rata-rata 62,25% berdasarkan kajian (Daris et al., 2023a) memaksa sebagian nelayan mencari sumber penghidupan alternatif. Daeng Situju mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa sepenuhnya bergantung dari melaut lagi karena hasil tangkapan tidak menentu, dan kadang harus mencari kerja lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Camat Galesong Utara, Mohammad Faisal Irfan, S.E., M.Si., memandang perubahan ini sebagai bagian dari dinamika pembangunan yang membuka diversifikasi pilihan pekerjaan bagi masyarakat. Namun perubahan mata pencaharian ini tidak selalu menunjukkan peningkatan kesejahteraan; bagi nelayan yang terpaksa beralih, perubahan ini lebih mencerminkan tekanan ekonomi akibat berkurangnya sumber daya laut dibandingkan pilihan sukarela. Kondisi ini

menunjukkan bahwa sistem pemerintahan belum sepenuhnya mampu melindungi keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya pesisir.

Pergeseran mata pencaharian yang bersifat terpaksa ini sejalan dengan temuan Bamasood dkk. (2025) yang mendokumentasikan bahwa reklamasi di Penang menyebabkan peningkatan biaya operasional dan kerusakan modal alami (*natural capital*) nelayan, sehingga mendorong sebagian nelayan untuk mencari mata pencaharian alternatif meski tanpa kesiapan yang memadai. Kajian ini juga menggarisbawahi bahwa ketidakmerataan kapasitas adaptasi antara nelayan yang memiliki keterampilan ganda dan nelayan yang hanya menguasai keahlian melaut mengakibatkan disparitas kesejahteraan yang semakin melebar. Kondisi ini diperkuat oleh kajian (Fardhiansyah, 2023) yang meneliti pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap, menemukan bahwa tanpa program pemberdayaan yang terstruktur dan tepat sasaran dari pemerintah daerah, nelayan yang terdampak cenderung beralih ke pekerjaan informal dengan tingkat pendapatan dan kepastian yang lebih rendah dibandingkan profesi melaut sebelumnya.

c. Ketimpangan Ekonomi

Paradoks pembangunan yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah meningkatnya ketimpangan ekonomi di tengah pertumbuhan agregat yang positif. Data makroekonomi Kabupaten Takalar menunjukkan tren yang menggembirakan: PDRB per kapita meningkat dari Rp33,97 juta (2021) menjadi Rp42,36 juta (2024), dan IPM meningkat dari 67,72 menjadi 72,06. Namun di sisi lain, Gini Rasio justru meningkat dari 0,365 (2021) menjadi 0,385 (2024), mengindikasikan pelebaran kesenjangan distribusi pendapatan.

Daeng Situju mengungkapkan secara langsung paradoks ini: memang ada perubahan ekonomi, tetapi tidak semua merasakan manfaatnya; yang paling diuntungkan adalah mereka yang terlibat langsung di tambang atau pekerjaan terkait, sementara nelayan yang bergantung pada laut justru paling dirugikan. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Ibu Irmawati Irwan, S.STP., M.Si., juga mengakui bahwa meskipun secara umum pembangunan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, manfaat pembangunan tidak selalu dirasakan secara langsung dan merata oleh seluruh masyarakat karena perbedaan kondisi sosial ekonomi dan jenis pekerjaan. Kondisi ini mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan adalah dua hal yang tidak selalu berbanding lurus.

Paradoks antara pertumbuhan ekonomi agregat dan pelebaran ketimpangan ini mendapat konfirmasi dari kajian internasional. (Zhou et al., 2025) menemukan korelasi positif yang kuat antara nilai layanan ekosistem dan urbanisasi akibat reklamasi, namun secara bersamaan menemukan korelasi negatif yang kuat antara ketangguhan ekologis dan urbanisasi. Artinya, reklamasi memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan tersebut mengorbankan ketangguhan ekosistem yang justru menjadi sumber penghidupan kelompok masyarakat rentan. Di level lokal, kajian (Alom & Santoso, 2024) tentang pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Jayapura menemukan bahwa ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan kelautan juga merupakan permasalahan sistemik yang dihadapi daerah-daerah pesisir di Indonesia timur, dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Fakta bahwa Gini Rasio Kabupaten Takalar meningkat dari 0,365 (2021) menjadi 0,385 (2024) secara bersamaan dengan kenaikan PAD

menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai redistribusi yang adil hanya akan memperparah ketimpangan struktural di masyarakat pesisir.

3.3. Dampak Reklamasi Pantai terhadap Sistem Pemerintahan di Kecamatan Galesong Utara

a. Peran Pemerintah Daerah

Dalam konteks reklamasi CPI, peran pemerintah Kabupaten Takalar lebih bersifat reaktif dan adaptif daripada proaktif, mengingat kewenangan utama pelaksanaan reklamasi berada pada tingkat pemerintah provinsi. Bapak Drs. Rahmansyah Lantara menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah lebih pada perencanaan dan penyesuaian program pembangunan daerah, di mana pemerintah kabupaten tetap melakukan koordinasi agar pembangunan yang berjalan selaras dengan kondisi masyarakat di daerah.

Keterbatasan kewenangan ini menyebabkan pemerintah daerah sulit untuk secara langsung mengintervensi atau menghentikan aktivitas penambangan yang berdampak negatif. Di satu sisi, pemerintah daerah memperoleh keuntungan fiskal dari retribusi penambangan. Di sisi lain, masyarakat terdampak seperti Daeng Situju berharap agar pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan kondisi masyarakat, terutama nelayan yang terdampak langsung. Kesenjangan antara harapan masyarakat dan kapasitas pemerintah daerah ini mencerminkan belum optimalnya hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan dan lingkungan sosial dalam kerangka ekologi pemerintahan.

Kondisi ini sejalan dengan temuan (Anwar et al., 2020) dalam kajian implementasi kebijakan reklamasi Pantai Kotamara di Kota Baubau, yang menemukan bahwa meskipun struktur birokrasi dan koordinasi antarlembaga sudah terbangun, sikap implementator dan kapasitas sumber daya yang belum maksimal menyebabkan dampak reklamasi terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir belum dapat diatasi secara optimal — pola yang sama persis ditemukan dalam konteks pemerintah Kabupaten Takalar yang menghadapi keterbatasan kewenangan dalam merespons dampak reklamasi CPI.

Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam konteks reklamasi ini mencerminkan permasalahan struktural yang bersifat lintas daerah. (Chen et al., 2025) dalam kajian mereka tentang dampak ekologis reklamasi di Taiping Bay, Tiongkok, menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan antarlevel pemerintahan dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem laut. Mereka berargumen bahwa kebijakan reklamasi yang efektif harus menyertakan mekanisme kompensasi ekologis dan restorasi yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, pengaturan kewenangan reklamasi yang berada di tingkat provinsi (berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) menciptakan kekosongan perlindungan (*protection gap*) bagi masyarakat di kabupaten yang menanggung dampak ekologis, seperti yang dialami masyarakat Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

b. Respons Pemerintah terhadap Dampak dan Keluhan Masyarakat

Pemerintah daerah telah merespons dampak reklamasi melalui beberapa program, namun respons tersebut belum optimal. Ibu Irmawati Irwan, S.STP, M.Si, menyatakan bahwa pemerintah berupaya merespons melalui program pemberdayaan ekonomi dan pemantauan,

tetapi implementasinya masih perlu ditingkatkan agar lebih tepat sasaran. Berdasarkan LKJIP Kabupaten Takalar 2024, pemerintah telah menyediakan sarana perikanan berupa jaring kepiting, jaring ikan, perahu, mesin perahu, bibit ikan bandeng, dan bibit rumput laut sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nelayan.

Namun masyarakat merasakan bahwa belum ada solusi yang benar-benar dirasakan secara langsung dan tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan masih belum jelas, sebagaimana diungkapkan oleh Daeng Situju dan Ibu Haryati. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya kebijakan yang dirumuskan pemerintah secara normatif dan realitas yang dirasakan masyarakat di lapangan, mengindikasikan bahwa respons pemerintah masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.

Kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas di lapangan yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan pola umum yang diidentifikasi dalam kajian (Afnas, 2018) tentang pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pangkep. Afnas menemukan bahwa program pemerintah yang bersifat bantuan material (berupa alat tangkap, bibit, dan perahu) cenderung tidak efektif dalam jangka panjang apabila tidak disertai dengan pendampingan yang berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan nelayan, dan akses terhadap permodalan. Tim Dosen IPDN dalam kajian mereka tentang Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis Kearifan Lokal juga menggarisbawahi bahwa pendekatan pemberdayaan yang paling efektif adalah yang mengintegrasikan kearifan lokal komunitas pesisir dengan dukungan teknis dan regulatoris dari pemerintah, bukan sekadar program bantuan fisik yang bersifat sesaat. Kondisi di Galesong Utara, di mana nelayan menerima bantuan alat tangkap tetapi biaya operasional melaut tetap tinggi karena harus menempuh jarak lebih jauh, mengonfirmasi bahwa respons pemerintah yang parsial tidak mampu mengatasi akar permasalahan secara menyeluruh.

c. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Kebijakan

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait reklamasi merupakan temuan penting yang mencerminkan karakter governance yang masih bersifat *top-down*. Daeng Situju mengungkapkan bahwa masyarakat tidak terlalu dilibatkan dan lebih banyak hanya menerima informasi saja tanpa ikut dalam pengambilan keputusan; aktivitas reklamasi sudah berjalan dan masyarakat hanya merasakan dampaknya. Ibu Haryati juga menyatakan bahwa sosialisasi secara langsung ke masyarakat sangat jarang, sehingga masyarakat kurang memahami bagaimana sebenarnya kebijakan itu dibuat.

Pemerintah daerah mengakui bahwa keterlibatan masyarakat masih terbatas karena proses reklamasi banyak dilakukan di tingkat provinsi. Rendahnya partisipasi formal ini mendorong masyarakat untuk berekspresi melalui partisipasi non-formal berupa aksi demonstrasi sebagai saluran aspirasi. Dalam perspektif ekologi pemerintahan, kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya keseimbangan antara sistem pemerintahan dan lingkungan sosial masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan seluruh kelompok masyarakat pesisir.

Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan reklamasi ini bukan hal baru dalam konteks Indonesia. (Tajem & Saribulan, 2019) dalam kajian mereka tentang konflik kepentingan dalam kebijakan reklamasi Teluk Benoa, Bali, yang diterbitkan di Jurnal Kebijakan

Pemerintahan IPDN, menemukan bahwa masyarakat kerap berada pada posisi tawar yang lemah dalam proses pengambilan keputusan reklamasi, sehingga ekspresi penolakan melalui gerakan sosial menjadi satu-satunya saluran partisipasi yang tersedia. Pola yang sama ditemukan di Galesong Utara, di mana demonstrasi masyarakat menjadi bentuk partisipasi non-formal akibat tersumbatnya saluran partisipasi formal dalam kebijakan reklamasi yang didominasi oleh aktor di tingkat provinsi

Rendahnya partisipasi formal masyarakat dalam kebijakan reklamasi ini juga sejalan dengan temuan kajian internasional. Bamasood dkk. (2025) mengidentifikasi bahwa salah satu permasalahan spesifik di Penang adalah disparitas dalam perizinan dan akses informasi antara nelayan skala kecil dan pemangku kepentingan besar, yang mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan dalam proses pengambilan kebijakan pesisir. Sementara itu, Tim Dosen IPDN dalam kajian pemberdayaan nelayan berbasis kearifan lokal menekankan bahwa partisipasi masyarakat pesisir yang bermakna hanya dapat terwujud apabila pemerintah secara aktif membuka ruang dialog yang setara, bukan hanya sosialisasi satu arah. Fakta bahwa masyarakat Galesong Utara mengekspresikan aspirasi mereka melalui demonstrasi sebagai bentuk partisipasi non-formal mengindikasikan tersumbatnya saluran partisipasi formal yang seharusnya disediakan oleh sistem pemerintahan. Dalam perspektif ekologi pemerintahan, kondisi ini mencerminkan kegagalan mekanisme umpan balik antara sistem pemerintahan dan masyarakat yang menjadi syarat utama bagi terwujudnya tata kelola pesisir yang responsif dan berkeadilan.

3.4. Upaya Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Dampak Reklamasi Pantai

Pemerintah daerah Kabupaten Takalar telah merumuskan tiga upaya penanggulangan dampak reklamasi pantai. Pertama, perlindungan dan pemulihan ekonomi nelayan terdampak, yang diwujudkan melalui pemberian bantuan sarana perikanan berupa jaring, perahu, mesin perahu, serta bibit ikan bandeng dan rumput laut *Eucheuma cottonii* sebagaimana termuat dalam LKJIP Kabupaten Takalar 2024. Daeng Situju mengapresiasi bantuan tersebut, meskipun mengakui bahwa biaya operasional melaut tetap lebih besar dari sebelumnya karena harus pergi lebih jauh. Implementasi program ini masih perlu diperkuat agar jangkauannya lebih merata kepada seluruh nelayan terdampak.

Kedua, pengelolaan dan pembatasan aktivitas penambangan pasir laut. Ibu Irmawati Irwan menekankan perlunya pengendalian aktivitas penambangan melalui pengaturan zona dan pengawasan di lapangan agar kegiatan tersebut tidak merugikan masyarakat. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi pengawasan masih menghadapi tantangan, di mana aktivitas penambangan masih berlangsung secara intensif dan nelayan seperti Daeng Situju masih merasakan berkurangnya ikan di sekitar wilayah pesisir. Ketiga, pemberdayaan dan diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir melalui pelatihan keterampilan usaha, pengembangan UMKM, dan dukungan usaha berbasis potensi lokal. Meskipun sebagian masyarakat telah menunjukkan inisiatif beralih ke sektor lain, program pemberdayaan yang terstruktur dan sistematis masih belum optimal menjangkau seluruh kelompok terdampak.

Ketiga upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Takalar tersebut dapat ditingkatkan efektivitasnya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari kajian-kajian terkini. Pertama, terkait perlindungan nelayan, Bamasood dkk. (2025) merekomendasikan agar program perlindungan nelayan terdampak reklamasi mencakup restorasi ekosistem, peningkatan kapasitas nelayan, dan pembentukan mekanisme kompensasi yang berkelanjutan bukan hanya

bantuan material sesaat. Kedua, terkait pengelolaan penambangan, Chen dkk. (2025) menekankan perlunya pengaturan zona penambangan yang ketat disertai skema restorasi ekologi yang terukur, agar kegiatan penambangan pasir tidak mengorbankan ekosistem yang menjadi sumber penghidupan nelayan secara permanen. Ketiga, terkait pemberdayaan ekonomi, kajian Afnas (2018) dan Fardhiansyah (2023) sama-sama menunjukkan bahwa program diversifikasi mata pencaharian nelayan paling efektif ketika dirancang berbasis kebutuhan nyata di lapangan, melibatkan masyarakat sebagai subjek bukan objek program, dan didukung oleh pendampingan jangka panjang dari dinas teknis terkait.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Bagian ini menyajikan perbandingan sistematis antara temuan penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu, baik yang bersifat konfirmatif (memperkuat), kontrastif (berbeda), maupun ekspansif (memperluas). Perbandingan dilakukan berdasarkan tiga dimensi ekologi pemerintahan yang menjadi fokus analisis, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan sistem pemerintahan.

Penelitian (Pahlevi & Tjenreng, 2025) yang mengkaji dampak reklamasi pantai di Kota Makassar menemukan bahwa reklamasi CPI menimbulkan dampak sosial berupa keresahan masyarakat, dampak ekonomi berupa perubahan aktivitas usaha di sekitar kawasan reklamasi, serta dampak lingkungan berupa perubahan ekosistem pesisir. Temuan penelitian ini bersifat konfirmatif sekaligus ekspansif terhadap kajian tersebut. Bersifat konfirmatif karena penelitian ini juga menemukan dampak sosial yang serupa, khususnya polarisasi hubungan masyarakat antara kelompok pro dan kontra reklamasi serta dampak ekonomi berupa pergeseran mata pencaharian. Namun, penelitian ini bersifat ekspansif karena membuktikan bahwa dampak reklamasi CPI tidak berhenti di Kota Makassar sebagai lokasi reklamasi, melainkan meluas secara lintas batas administratif ke Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai wilayah pemasok material. Perbedaan mendasarnya terletak pada subjek dampak: Pahlevi dan Tjenreng meneliti masyarakat di lokasi reklamasi yang menerima manfaat pembangunan langsung, sementara penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Galesong Utara justru menanggung beban ekologis tanpa menerima manfaat pembangunan yang setara. Ini mempertegas adanya ketidakadilan distribusional (*distributional injustice*) dalam tata kelola reklamasi CPI yang belum terdokumentasi sebelumnya.

(Agustina et al., 2023) menganalisis dampak penambangan pasir terhadap abrasi pantai di Galesong, Kabupaten Takalar, menggunakan analisis citra satelit dan GIS, dan menemukan bahwa abrasi signifikan terjadi di beberapa titik pesisir akibat aktivitas penambangan pasir laut. Temuan penelitian ini bersifat komplementer dan sekaligus mendalami dimensi yang tidak dijangkau oleh kajian Agustina dkk. Secara komplementer, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa dampak penambangan pasir yang diidentifikasi oleh Agustina dkk. secara fisik-spasial juga dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk nyata: abrasi yang mengubah karakteristik pesisir telah memperjauh jarak tempuh nelayan ke lokasi tangkap, meningkatkan biaya operasional, dan menurunkan hasil tangkapan rata-rata 62,25% (Daris et al., 2023a). Artinya, angka abrasi yang dihasilkan oleh pendekatan GIS Agustina dkk. mendapat padanannya yang manusiawi dalam penelitian ini berupa penurunan kesejahteraan nelayan yang terukur. Perbedaan substantifnya adalah bahwa Agustina dkk. berhenti pada konstasi fisik (seberapa parah abrasi), sementara penelitian ini melanjutkan analisis ke dimensi berikutnya, yaitu bagaimana abrasi tersebut mengubah hubungan sosial, struktur ekonomi, dan kapasitas respons pemerintahan di masyarakat terdampak.

(Firmansyah, 2020) mengkaji kebijakan reklamasi Pantai Jakarta secara makro dan menemukan adanya resistensi publik yang kuat serta berbagai permasalahan tata ruang dan perizinan di tingkat nasional. Temuan penelitian ini memiliki kesamaan sekaligus perbedaan yang penting dengan kajian Firmansyah. Kesamaannya terletak pada ditemukannya resistensi publik yang juga hadir di Galesong Utara dalam bentuk aksi demonstrasi masyarakat, mengonfirmasi bahwa penolakan terhadap reklamasi merupakan pola yang berulang di berbagai lokasi di Indonesia. Namun, perbedaan yang paling signifikan terletak pada level analisis dan konteks, di mana Firmansyah mengkaji resistensi sebagai fenomena kebijakan makro yang melibatkan aktor-aktor besar (DPRD, LSM, media nasional), sedangkan penelitian ini mengungkap bahwa resistensi di Galesong Utara bersifat mikro dan bervariasi antara kelompok masyarakat. Selain itu, sementara Firmansyah menyoroti persoalan tata ruang dalam satu kota, penelitian ini menemukan persoalan yang lebih kompleks berupa *governance gap* antarlevel pemerintahan, di mana kewenangan reklamasi berada di provinsi, tetapi dampaknya harus ditanggung oleh kabupaten, sehingga hal ini menjadi suatu dimensi pemerintahan yang tidak terjangkau oleh analisis kebijakan dokumen yang digunakan Firmansyah.

(Inaku et al., 2021) mengkaji dinamika fisik pesisir Kabupaten Takalar menggunakan analisis oseanografi, khususnya pola perubahan garis pantai pada musim timur dan barat. Temuan penelitian ini bersifat saling melengkapi dengan kajian Inaku dkk. dalam konteks yang berbeda. Inaku dkk. membuktikan secara ilmiah bahwa pesisir Takalar memiliki karakteristik dinamika fisik yang rentan terhadap perubahan, suatu temuan yang secara tidak langsung menjelaskan mengapa penambangan pasir laut berdampak begitu masif terhadap ekosistem pesisir Galesong Utara. Penelitian ini mengambil alih dari titik di mana Inaku dkk. berhenti: jika Inaku dkk. membuktikan kerentanan fisik pesisir Takalar, penelitian ini membuktikan kerentanan sosial-ekonomi masyarakatnya. Masyarakat nelayan yang bergantung pada ekosistem laut yang rapuh tersebut terbukti menjadi kelompok yang paling terpapar dampak ketika sistem ekologi pesisir terganggu oleh aktivitas penambangan pasir berskala besar. Dengan demikian, keduanya secara bersama-sama membentuk gambaran yang lebih utuh tentang kerentanan berlapis (*layered vulnerability*), menyangkut masalah fisik dan social yang ada di pesisir Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

(Anwar et al., 2020) meneliti implementasi kebijakan reklamasi Pantai Kotamara di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan berbagai permasalahan dalam proses implementasi kebijakan reklamasi di tingkat daerah. Dari kelima penelitian terdahulu, Anwar dkk. memiliki kesamaan metodologis paling dekat dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengkaji reklamasi pantai di Sulawesi. Persamaan temuan juga ditemukan pada dimensi sistem pemerintahan: Anwar dkk. menemukan bahwa implementasi kebijakan reklamasi di tingkat daerah menghadapi kendala koordinasi dan kapasitas kelembagaan, yang paralel dengan temuan penelitian ini bahwa pemerintah Kabupaten Takalar menghadapi keterbatasan kewenangan dan kapasitas respons terhadap dampak reklamasi yang kewenangan utamanya berada di tingkat provinsi. Perbedaan mendasarnya terletak pada fokus analisis: Anwar dkk. berfokus pada proses implementasi kebijakan reklamasi itu sendiri (bagaimana reklamasi dilakukan), sementara penelitian ini berfokus pada dampak ekologi pemerintahan yang ditimbulkan reklamasi terhadap masyarakat (apa yang terjadi pada masyarakat akibat reklamasi). Selain itu, konteks Baubau sebagai kota yang melakukan reklamasi di wilayahnya sendiri berbeda secara fundamental dengan konteks

Galesong Utara sebagai wilayah yang terdampak oleh reklamasi yang dilakukan kota lain di provinsi yang sama.

Secara keseluruhan, perbandingan antara temuan penelitian ini dengan kelima penelitian terdahulu menghasilkan tiga kesimpulan komparatif. Pertama, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa pola dampak reklamasi pantai, termasuk polarisasi sosial, penurunan kesejahteraan nelayan, dan lemahnya partisipasi masyarakat, merupakan pola yang berulang dan konsisten di berbagai lokasi reklamasi di Indonesia, sebagaimana ditemukan oleh Pahlevi dan Tjenreng (2025), Firmansyah (2020), dan Anwar dkk. (2020). Kedua, penelitian ini memperluas batas pengetahuan yang ada dengan membuktikan bahwa dampak tersebut tidak hanya terjadi di lokasi reklamasi, tetapi juga di wilayah pemasok material yang berada di kabupaten yang berbeda, hal ini merupakan suatu temuan yang tidak dijangkau oleh satu pun dari kelima penelitian terdahulu. Ketiga, penelitian ini menjembatani kesenjangan antara kajian fisik-spasial (Agustina dkk., 2023; Inaku dkk., 2021) dan kajian kebijakan makro (Firmansyah, 2020; Anwar dkk., 2020) dengan menyajikan analisis yang menempatkan masyarakat dan pemerintahan sebagai unit analisis utama melalui kerangka ekologi pemerintahan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang paradoks pembangunan pesisir di Indonesia.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan beberapa temuan menarik di luar variabel utama. Pertama, fenomena paradoks fiskal-sosial yang terjadi di Kabupaten Takalar, di mana peningkatan PAD dari retribusi penambangan justru berlangsung bersamaan dengan meningkatnya Gini Rasio, menunjukkan bahwa keuntungan fiskal tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi pemerataan kesejahteraan. Kedua, terdapat polarisasi komunitas yang tidak bersifat konflik terbuka, melainkan lebih kepada perbedaan kepentingan yang terkelola secara informal melalui diversifikasi mata pencaharian. Ketiga, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tingkat provinsi menciptakan ruang kekosongan perlindungan *(protection gap)* bagi masyarakat terdampak, suatu kondisi yang memerlukan mekanisme koordinasi lintas level pemerintahan yang lebih efektif.

Ketiga temuan menarik tersebut memiliki implikasi kebijakan yang penting. Terkait paradoks fiskal-sosial, Zhou dkk. (2025) menemukan bahwa korelasi negatif antara ketangguhan ekologis dan urbanisasi akibat reklamasi mengindikasikan perlunya mekanisme internalisasi biaya ekologis dalam sistem fiskal daerah. Artinya, PAD yang diperoleh dari retribusi penambangan seharusnya sebagian dialokasikan kembali untuk program restorasi ekosistem dan perlindungan nelayan. Terkait polarisasi komunitas tanpa konflik terbuka, kajian Tim Dosen IPDN tentang pemberdayaan nelayan berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa kearifan lokal berperan sebagai mekanisme buffer yang meredam potensi konflik, namun kapasitas buffer ini tidak tak terbatas apabila tekanan ekonomi pada kelompok nelayan terus meningkat tanpa intervensi kebijakan yang tepat, polarisasi yang saat ini terkelola secara informal berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih terbuka. Terkait protection gap akibat terbatasnya kewenangan pemerintah daerah, Chen dkk. (2025) merekomendasikan model koordinasi multilevel yang mengintegrasikan kebijakan reklamasi provinsi dengan program penanggulangan dampak di tingkat kabupaten, suatu rekomendasi yang sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks hubungan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Takalar.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis dampak reklamasi pantai Kota Makassar bagi masyarakat di Kecamatan Galesong Utara menggunakan teori ekologi pemerintahan Syafiie (2019) yang mencakup tiga dimensi: sosial, ekonomi, dan sistem pemerintahan. Analisis didasarkan pada hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi yang dilakukan pada tanggal 5–25 Januari 2026.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan dari kelompok nelayan yang relatif terbatas (satu orang), sehingga representasi perspektif nelayan belum sepenuhnya komprehensif. Selain itu, penelitian dilakukan pada satu titik waktu (*cross-sectional*) sehingga tidak dapat menangkap perubahan dinamis yang terjadi dari waktu ke waktu. Cakupan penelitian juga terbatas pada Kecamatan Galesong Utara saja tanpa perbandingan dengan kecamatan pesisir lainnya di Kabupaten Takalar.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan perluasan cakupan penelitian ke seluruh kecamatan pesisir di Kabupaten Takalar menggunakan metode campuran (*mixed methods*) guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan terukur. Studi longitudinal yang mengamati perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir sebelum dan sesudah reklamasi secara sistematis juga diperlukan untuk menangkap dinamika yang lebih akurat. Selain itu, kajian komparatif antara wilayah pemasok material reklamasi di berbagai daerah di Indonesia dapat memberikan kontribusi penting bagi kebijakan nasional pengelolaan dampak reklamasi lintas batas.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afnas, M. S. (2018). *Pemberdayaan kelompok nelayan Pulau Saugi melalui kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA) oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/739/

AGUSTINA, A., Djafar, A. U. M., & D, D. (2023). DAMPAK PENAMBANGAN PASIR TERHADAP ABRASI PANTAI DI PANTAI GALESONG KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN. *Jurnal Sains Dan Teknologi Perikanan*, *3*(1). https://doi.org/10.55678/jikan.v3i1.891

Alom, F. M., & Santoso, E. B. (2024). *Pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura Provinsi Papua* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/

Anwar. (2020). *Implementasi Kebijakan Reklamasi Pantai Kotamara di Kota Baubau*.

Anwar, T. I., Effendy, K., & Djunaedi, S. (2020). Implementasi kebijakan reklamasi pantai Kotamara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, *11*(4), 677–688. https://doi.org/http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/508

Aswandi, K. (2024). *nalisis Dampak Proyek Reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI)*

terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Panambungan Mariso Makassar [Hasanuddin University]. https://repository.unhas.ac.id/37677/1/A052201002_tesis_22-08-2024 bab I-II.pdf

Bamasood, S. A., Sayed, K., Syakir, M. I., Jaafar, M. H., & Zuknik, M. (2025). Impacts of coastal reclamation on small-scale fishers in Penang, Malaysia. *Ocean & Coastal Management*, *270*, 107903. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107903

Chen, Y., Li, Y., Shou, Y., Liu, B., Li, H., Liu, B., Chen, S., & Dong, S. (2025). Exploring the ecological impacts and implementation strategies of reclamation in Taiping Bay of Dalian Port as an example. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, *166*, 105023. https://doi.org/10.1016/j.jtice.2023.105023

Daris, L., Asriandi, Irwansyah, & Arifandi. (2023a). Analisis dampak penambangan pasir laut terhadap sosial ekonomi masyarakat pesisir Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal Agrikanha*, *16*, 184–185.

Daris, L., Asriandi, Irwansyah, & Arifandi. (2023b). *Analisis dampak penambangan pasir laut terhadap sosial ekonomi masyarakat pesisir Desa Aeng Batu Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi kasus penambangan pasir laut PT. Gasing Sulawesi)*. *16*, 184–185. https://doi.org/https://www.journals.sangia.org/agrikanhttps://doi.org/10.29239Kot

Fardhiansyah, M. (2023). *Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap di Pulau Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/

Firmansyah. (2020). *Analisis Kebijakan Reklamasi Pantai Jakarta*.

Inaku, D. F., Nurdin, N., & Satari, D. Y. (2021). *Perubahan garis pantai pada musim timur dan barat kaitannya dengan karakteristik gelombang di pesisir Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan*. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jkt.v24i3.11095

Kuang, C., Wang, D., Wang, G., Liu, J., Han, X., & Li, Y. (2024). Impact of reclamation projects on water quality in Jinmeng Bay, China. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, *300*, 108719. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2024.108719

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Pahlevi, M. R., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). *Dampak Reklamasi Pantai Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)]. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23040

Syafiie, I. K. (2019). *Ekologi Pemerintahan Di Indonesia* (Cetakan 2). Pustaka Reka Cipta.

Tajem, M. D. A., & Saribulan, N. (2019). Konflik kepentingan dalam kebijakan reklamasi Kawasan Teluk Benoa Provinsi Bali: Kajian tentang konsep Tri Hita Karana. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, *2*(2), 127–145. https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.912

Wasistiono, S., & Simangunsong, F. (2020). *Teori Pemerintahan Daerah*. Universitas Terbuka.

Zhou, L., Qin, Y., Cheng, J., Zhu, H., Li, M., Zhang, J., LeBleu, C., Shen, G., Chen, T., & Liu, Y. (2025). Urban ecosystem services, ecological security patterns and ecological resilience in coastal cities: The impact of land reclamation in Macao SAR. *Journal of Environmental Management*, *373*, 123750. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123750